

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan bagi suatu Bangsa dan Negara, jika ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan di era kemajuan teknologi, maka dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah melaksanakan berbagai pembangunan khususnya dalam bidang Pendidikan. Dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di tegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada masyarakat sebagai peserta didik, sehingga bisa terbentuk masyarakat madani dengan ciri utama, berbudi pekerti luhur, berintelektual dan berwawasan Kebangsaan.

Secara nasional angka indeks pembangunan manusia ditentukan oleh tiga sektor utama yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sektor ekonomi sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat terhadap suatu barang, sektor kesehatan ditentukan rata-rata oleh angka harapan hidup dan kurangnya kematian bayi, sedangkan sektor pendidikan adalah ditentukan buta aksara dan rata-rata lama sekolah. Ketiga sektor inilah yang sangat menentukan terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh karena kebijakan pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional bahwa Tahun 2009 angka buta aksara harus berkurang hingga mencapai angka secara Nasional tinggal 5%. Sehingga untuk memperkecil angka buta aksara, pemerintah melakukan program pendidikan keaksaraan pada jalur pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah. Program ini diperuntukan bagi seluruh

warga masyarakat yang masih memiliki predikat buta aksara yang berada pada rentang usia 15 tahun ke atas. penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang akan terus dikembangkan adalah program keaksaraan fungsional. Program ini selain memenuhi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah, juga merupakan komitmen bersama para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konferensi yang dilaksanakan di Jomiten Thailand pada tahun 1990 yang didukung dan diselenggarakan oleh UNESCO, UNICEF, World Bank, UNFPA dan UNDP Atas dasar itu lahir suatu gagasan sekaligus komitmen untuk menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional (KF) sebagai wujud dari pendidikan dasar penyandang buta aksara.(Danim, 2008:71).

Program keaksaraan fungsional adalah implementasi sebuah konsep pembelajaran berbasis masyarakat, sebagaimana yang dikatakan Fasli Jalal dalam BPS(2010) bahwa pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk *community based learning*, yaitu pembelajaran yang dirancang, diatur,dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat. (BPS, 2010). Agar masyarakat terhindar dari buta huruf,maka pemerintah mencanangkan program pemberantasan buta huruf yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan sama sekali. Penduduk Indonesia sejumlah 15,5 juta jiwa menyandang buta aksara(BPS, 2010).

Klafikasi warga belajar KF terdiri dari aksarawan baru dan aksarawan lanjutan. Warga belajar yang berasal dari latar belakang ekonomi yaitu berasal dari penduduk miskin dan termajinalkan, sedangkan jika dilihat dari sisi geografi

mereka berasal dari daerah terpencil atau masyarakat pinggiran yang tidak berkesempatan memperoleh akses atau pelayanan pendidikan yang memadai. Kebutuhan belajar yang multilevel (beragam kemampuan) tersebut mengakibatkan program KF dikelompokkan dalam tiga tahap keaksaraan yaitu pemberantasan (*basic literacy*), pembinaan (*middle literacy*), dan pelestarian (*self learning*).

Tujuan utama penyelenggaraan program keaksaraan fungsional mandiri ini bukanlah hanya untuk peningkatan index pembangunan manusia melainkan memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan sehingga mereka memiliki keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya menjadi insan produktif dan sejahtera. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan keaksaraan fungsional mandiri ada dua aspek kemampuan utama yang dikembangkan yaitu kemampuan dasar dan kemampuan fungsional.

Dalam pengembangan kemampuan tersebut didasarkan pada tingkat kemampuan awal warga belajar yang dikelompokkan dalam tiga tahapan yaitu :

1. Tahapan dasar diperuntukkan bagi mereka yang sama sekali tidak mengenal huruf atau buta huruf murni.
2. Tahapan pembinaan yaitu mereka yang sudah tahu membaca namun masih perlu bantuan orang lain.
3. Tahapan mandiri yaitu sudah lancar membaca, menulis dan menghitung, sudah mampu mencari dan menentukan bahan belajar sendiri (dalam Yudikustiana, <http://www.riapos.wordpress.com> diakses 8 Desember 2011)

Dari ketiga aspek pengelompokan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pembinaan agar tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil. Tujuan utama dalam megelompokan ini adalah untuk memudahkan dalam mengontrol dan pembinaan terhadap penuntasan buta aksara.

Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan.

(dalam Yudistiana <http://www.riapos.wordpress.com> diakses 8 Desember 2011)

Masalah-masalah yang dihadapi peserta didik KF adalah masalah-masalah aktual yang memerlukan solusi efektif dan cepat. Para penyandang buta aksara, anak-anak usia dini yang belum memperoleh pendidikan dan perawatan yang memadai, anak-anak yang putus sekolah atau belum/tidak pernah sekolah, penduduk yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, diskriminasi laki-laki dan perempuan, dan sebagainya, adalah masalah-masalah sosial-ekonomi yang akan selalu membawa bangsa dalam persoalan struktural kemiskinan dan keterbelakangan. Solusi pendidikan melalui KF diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara fundamental, asalkan dilakukan dengan strategi dan program yang efektif, serta komitmen yang sungguh-sungguh.

Secara konsepsi, keaksaraan (*literacy*) dapat dijabarkan dalam tiga kategori, yaitu *basic literacy*, *funcional literacy*, dan *advanced literacy*. Pengertian *basic literacy* adalah kemampuan keaksaraan yang paling dasar dimana penilaiannya didasarkan hanya sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. *funcional literacy* adalah sudah memberikan muatan kecakapan hidup/keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan lebih positif dalam kehidupan masyarakat. *advanced literacy* merupakan tingkat keaksaraan yang paling tinggi dimana seseorang sudah memiliki kapasitas melakukan analisis, berpikir konseptual dan kritis, serta mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya untuk memberikan kontribusi yang bernilai bagi kemajuan dan kesejahteraan baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Dalam Pasaribu dan Simanjuntak(<http://www.humas.kutai.kartanegarab.go.id.com/> diakses 4 Maret 2012)

Pendidikan keaksaraan diupayakan untuk sejalan dengan program pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Program ini menggunakan pendekatan peningkatan kecakapan hidup (*life skills*). Dengan mengacu pada standar keaksaraan yang jelas dan terukur agar hasilnya dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

Untuk mengintensifkan pemberantasan buta aksara pemerintah bersama-sama masyarakat melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Indonesia (GN-PPBAI), yang menggunakan strategi berikut.

*Pertama*, dilaksanakan melalui program reguler yang sejauh ini sedang berlangsung dilembaga-lembaga penyelenggara PNF (PKBM, SKB, BPKB, dll);

*kedua*, melakukan *assessment dan* pendataan untuk mengetahui kondisi dan posisi sasaran/target terkini yang akan dicapai, serta hasil pencapaian program disetiap akhir periodisasi pelaksanaan program. Kegiatan yang akan dilakukan adalah melaksanakan *Quick Count*, pendataan "by name", kerjasama dan koordiansi dengan BPS, dan memanfaatkan LAMP (*Literasy Assessment Monitoring Program*); *ketiga*, melaksanakan sosialisasi program melalui beberapa media, termasuk iklan TV, radio, internet, media cetak, dll; *keempat*, lebih intensif mamusatkan kegiatan pada kantong-kantong buta aksara; *kelima*, membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai organisasi sosial/perempuan, keagamaan, Dewan Masjid, Pengurus Tinggi dan Sekolah, model pelaksanaan kemitraan ini disebut dengan *strategi pendekatan horisontal*; *keenam*, menggunakan kapasitas "pemerintahan" dalam program keaksaraan, yaitu dengan memberikan *blockgrant* untuk pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, dan pelaksana kegiatan serta menerepkan intruksi Pemerintahan Daerah dalam menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam program keaksaraan, model pelaksanaan ini disebut dengan *strategi pendekatan vertikal*. Dalam Pasaribu dan Simanjuntak(<http://www.humas.kutaikartanegarak.ab.go.id.com/> diakses 4 Maret 2012)

Dalam upaya pemberantasan buta aksara, pemerintah mencanangkan program pemberantasan buta huruf yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan sama sekali. Namun fenomena masih menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat buta aksara yang kurang menyadari kebutaaksaraannya dan tidak mau tahu dengan keadaannya, yang

dipicu oleh adanya anggapan bahwa tanpa pendidikan pun orang dapat berusaha dan memperoleh penghasilan, budaya malu belajar di usia lanjut karena takut ditertawai anak-anaknya, kurangnya waktu yang tersedia dan sebagainya. Hal ini dapat diketahui dari respon warga masyarakat terhadap program KF yang terkesan pasif, serta adanya warga belajar yang sering tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran walaupun tutor sudah berusaha untuk melakukan proses pembelajaran seefektif mungkin. Fenomena ini jika dibiarkan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sedang digalakkan sekarang ini dalam rangka mengikuti perkembangan dunia yang semakin lama makin pesat dan canggih.

Untuk itu dituntut kinerja pengelola, penyelenggara dan tutor keaksaraan fungsional yang lebih optimal dan memadai. Peran penyelenggara dan tutor tidak hanya pada proses pembelajaran akan tetapi mulai dari merencanakan kegiatan belajar mengajar, mengidentifikasi minat dan kebutuhan warga, menyusun kurikulum, mencari bahan belajar sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan warga belajar, mengevaluasi pembelajaran dan yang paling utama dalam mengatasi kepasifan warga dalam merespon program ini adalah memberikan motivasi terhadap minat warga belajar agar mau mengikuti pembelajaran secara efektif. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual yang sangat berperan dalam penumbuhan gairah, perasaan senang, dan semangat untuk belajar. Keaksaraan Fungsional sebagaimana juga institusi pendidikan lainnya, dalam rangka meningkatkan minat belajar warganya sudah tentu motivasi sangat diperlukan.

Sesuai pengamatan awal pada KF Mandiri PKBM Tri Karya di Desa Polohungo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, minat warga belajar belum termotivasi secara optimal, pada hal penyelenggara dan tutor telah memberikan sosialisasi tentang tujuan program KF Mandiri tersebut. Hal ini terlihat pada respon dan keikutsertaan warga dalam mengikuti pembelajaran KF yang belum maksimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang motivasi warga belajar dalam Keaksaraan Fungsional Mandiri di Desa Polohungo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah pokok, yaitu Bagaimana Motivasi Warga Belajar Keaksaraan Fungsional Mandiri di Desa Polohungo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi warga belajar Keaksaraan Fungsional Mandiri di Desa Polohungo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan luar sekolah.

- 2) Bagi peneliti diharapkan akan menambah wawasan dalam dunia penelitian dan khazanah pengetahuan yang benar-benar ilmiah yang dapat diabdikan kepada masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi pihak penyelenggara dan tutor hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan informasi yang sifatnya ilmiah, dalam upaya pemberian motivasi minat terhadap warga belajar agar dapat memberikan respon positif terhadap program KF Mandiri
- 2) Bagi warga belajar hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga yang sifatnya ilmiah dalam rangka memotivasi diri, menambah semangat belajar serta berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui KF Mandiri.
- 3) Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya,